

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan terdapat dua strategi yang harus di tempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur (Ferezegia, 2018:6)

Pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mengatasi problematika kemiskinan, kurangnya pendidikan, lemahnya perekonomian dalam masyarakat dengan membentuk Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk selanjutnya PKH merupakan Program Nasional yang telah diimplementasikan sejak tahun 2007 oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan PKH secara teknik dijalankan berdasarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor: 42/ HUK/ 2007 tentang PKH bagi Rumah Tangga Sangat Miskin. Program ini dikeluarkan melalui Kementerian Sosial dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dibidang

sosial. Dari sisi kebijakan sosial, PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial bersyarat, khususnya bagi rumah tangga sangat miskin. PKH yang mewajibkan rumah tangga sangat miskin memeriksa kesehatan ibu hamil dan memberikan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang anak, termasuk menyekolahkan anak-anak, akan membawa perubahan perilaku bagi rumah tangga sangat miskin terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan. Perubahan perilaku tersebut diharapkan juga akan berdampak pada berkurangnya anak usia sekolah rumah tangga sangat miskin yang bekerja ataupun tidak melanjutkan pendidikan. Sebaliknya hal ini menjadi tantangan utama pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin dimanapun mereka berada. Dalam pelaksanaan PKH tidak dapat dilepas dari perhatian terhadap perempuan dan pemberdayaan perempuan harus menjadi prioritas program.

Salah satu jenis program penanggulangan kemiskinan yang telah diperaktekan diberbagai negara dikenal dengan *Conditional Cash Transfer* (CCT). CCT adalah jenis program yang memberikan bantuan tunai kepada kelompok miskin dengan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi (Doetichem, 2008). PKH merupakan salah satu bentuk pemberdayaan pendidikan ekonomi dan kesehatan yang dirancang untuk membantu para wanita pada sisi beban pengeluaran khususnya terkait dengan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk jangka pendek dan memperbaiki pola pikir serta mengubah perilaku serta SDMnya agar mampu mengembangkan segala potensi melalui pemberdayaan perempuan.

Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) merupakan unsur pelaksana Pemerintah bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah, Dinas Sosial sebagaimana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris daerah, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah dibidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, dengan demikian Peran Dinas Sosial Kabupaten TTU dalam pemberdayaan perempuan melalui PKH adalah untuk mengupayakan agar masyarakat mempunyai keberdayaan diri dalam membangun, mengembangkan dan bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Oleh karena itu pendampingan sangat penting bagi penerima PKH, penguatan PKH akan bertanggung jawab pada peran dan fungsi pendamping dari berbagai program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat untuk mempermudah mendefenisikan standar kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Program yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten TTU khususnya pada Desa Maubesi yang berkaitan dengan Pemberdayaan perempuan melalui PKH, yaitu dengan pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE) yang terdiri dari ibu PKH agar kelompok tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan ekonomi produktif (khususnya dalam peningkatan pendapatan). Pelaksanaan program KUBE di Desa Maubesi pertama kali dimulai pada tahun 2019. Pada saat itu terdapat 4 kelompok KUBE yang dibentuk yaitu Dusun Bibase, Dusun Sobe, Dusun Nakol dan Dusun Seumbam namun seiring berjalannya waktu pada tahun 2021 tersisa 2 kelompok yang masih aktif sampai sekarang yaitu KUBE Dusun

Bibase dengan jenis KUBEnya adalah ternak babi dan KUBE Dusun Seumbam dengan jenis KUBEnya adalah pembuatan batu merah.

Dalam pelaksanaan PKH pada Desa Maubesi dalam Pemberdayaan perempuan sudah berjalan dengan efektif akan tetapi dampaknya tidak besar hal itu terjadi karena kelompok usaha (KUBE) yang telah dibentuk kurang mendapatkan pemantauan serta evaluasi dari pendamping Program Keluarga Harapan sehingga efektifitas operasional KUBE berjalan seadanya saja, tidak melalui pengorganisasian kelompok yang benar sehingga kekompakan kelompok menjadi terganggu dan menyebabkan kelompok hanya dikelola oleh beberapa pihak saja.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Perempuan melalui program keluarga harapan (PKH) Pada Desa Maubesi Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian yaitu **“Bagaimanakah Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui PKH di Desa Maubesi”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan perempuan melalui PKH pada Desa Maubesi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam kajian studi administrasi negara khususnya Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui PKH pada Desa Maubesi.

2. Manfaat praktis

a. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori peran dinas sosial dalam pemberdayaan perempuan melalui PKH di Desa Maubesi.

b. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai informasi dalam kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam menambah kajian maupun referensi bagi mahasiswa.

c. Sebagai rujukan bagi penenliti lain yang akan melakukan penelitian dengan fokus yang sama.

BAB I

PENDAHULUAN

1.5 Latar belakang

Salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program untuk

pengentasan kemiskinan yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan terdapat dua strategi yang harus di tempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur (Ferezegia, 2018:6)

Pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mengatasi problematika kemiskinan, kurangnya pendidikan, lemahnya perekonomian dalam masyarakat dengan membentuk Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk selanjutnya PKH merupakan Program Nasional yang telah diimplementasikan sejak tahun 2007 oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan PKH secara teknik dijalankan berdasarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor: 42/ HUK/ 2007 tentang PKH bagi Rumah Tangga Sangat Miskin. Program ini dikeluarkan melalui Kementerian Sosial dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dibidang sosial. Dari sisi kebijakan sosial, PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial bersyarat, khususnya bagi rumah tangga sangat miskin. PKH yang mewajibkan rumah tangga sangat miskin memeriksa kesehatan ibu hamil dan memberikan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang anak, termasuk menyekolahkan anak-anak, akan membawa perubahan perilaku bagi rumah tangga sangat miskin terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan. Perubahan perilaku tersebut diharapkan juga akan berdampak pada berkurangnya

anak usia sekolah rumah tangga sangat miskin yang bekerja ataupun tidak melanjutkan pendidikan. Sebaliknya hal ini menjadi tantangan utama pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin dimanapun mereka berada. Dalam pelaksanaan PKH tidak dapat dilepas dari perhatian terhadap perempuan dan pemberdayaan perempuan harus menjadi prioritas program.

Salah satu jenis program penanggulangan kemiskinan yang telah diperaktekan diberbagai negara dikenal dengan *Conditional Cash Transfer* (CCT). CCT adalah jenis program yang memberikan bantuan tunai kepada kelompok miskin dengan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi (Doetichem, 2008). PKH merupakan salah satu bentuk pemberdayaan pendidikan ekonomi dan kesehatan yang dirancang untuk membantu para wanita pada sisi beban pengeluaran khususnya terkait dengan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk jangka pendek dan memperbaiki pola pikir serta mengubah perilaku serta SDMnya agar mampu mengembangkan segala potensi melalui pemberdayaan perempuan.

Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) merupakan unsur pelaksana Pemerintah bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah, Dinas Sosial sebagaimana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris daerah, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah dibidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, dengan demikian Peran Dinas Sosial Kabupaten TTU dalam pemberdayaan

perempuan melalui PKH adalah untuk mengupayakan agar masyarakat mempunyai keberdayaan diri dalam membangun, mengembangkan dan bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Oleh karena itu pendampingan sangat penting bagi penerima PKH, pengentasan PKH akan bertanggung jawab pada peran dan fungsi pendamping dari berbagai program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat untuk mempermudah mendefinisikan standar kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Program yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten TTU khususnya pada Desa Maubesi yang berkaitan dengan Pemberdayaan perempuan melalui PKH, yaitu dengan pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE) yang terdiri dari ibu PKH agar kelompok tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan ekonomi produktif (khususnya dalam peningkatan pendapatan). Pelaksanaan program KUBE di Desa Maubesi pertama kali dimulai pada tahun 2019. Pada saat itu terdapat 4 kelompok KUBE yang dibentuk yaitu Dusun Bibase, Dusun Sobe, Dusun Nakol dan Dusun Seumbam namun seiring berjalannya waktu pada tahun 2021 tersisa 2 kelompok yang masih aktif sampai sekarang yaitu KUBE Dusun Bibase dengan jenis KUBEnya adalah ternak babi dan KUBE Dusun Seumbam dengan jenis KUBEnya adalah pembuatan batu merah.

Dalam pelaksanaan PKH pada Desa Maubesi dalam Pemberdayaan perempuan sudah berjalan dengan efektif akan tetapi dampaknya tidak besar hal itu terjadi karena kelompok usaha (KUBE) yang telah dibentuk kurang mendapatkan pemantauan serta evaluasi dari pendamping Program Keluarga Harapan sehingga efektifitas operasional KUBE berjalan seadanya saja, tidak

melalui pengorganisasian kelompok yang benar sehingga kekompakan kelompok menjadi terganggu dan menyebabkan kelompok hanya dikelola oleh beberapa pihak saja.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Perempuan melalui program keluarga harapan (PKH) Pada Desa Maubesi Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara”**

1.6 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian yaitu **“Bagaimanakah Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui PKH di Desa Maubesi”**

1.7 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan perempuan melalui PKH pada Desa Maubesi.

1.8 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung :

3. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam kajian studi administrasi negara khususnya Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui PKH pada Desa Maubesi.

4. Manfaat praktis

- d. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori peran dinas sosial dalam pemberdayaan perempuan melalui PKH di Desa Maubesi.
- e. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai informasi dalam kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam menambah kajian maupun referensi bagi mahasiswa.
- f. Sebagai rujukan bagi penenliti lain yang akan melakukan penelitian dengan fokus yang sama.